

PENOLAKAN PENAMBANGAN TIMAH OLEH KELOMPOK NELAYAN DI PERAIRAN PANTAI MATRAS, KABUPATEN BANGKA

¹*Kiki Ulvianti*

¹Universitas Bangka Belitung

Email: kiky17@gmail.com

²*Ibrahim*

²Universitas Bangka Belitung

Email: iim_babel@yahoo.com

³*Ranto*

³Universitas Bangka Belitung

Email: rantopalempat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas konflik antara penambang timah dan masyarakat nelayan pesisir di perairan Pantai Matras, Kabupaten Bangka. Konflik ini dipicu oleh masuknya kapal isap produksi (KIP) untuk melakukan pengerukan biji timah yang ada di perairan Pantai Matras, Kabupaten Bangka. Hal tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat sehingga terbentuklah kelompok pro tambang dan kelompok kontra tambang, kelompok kontra tersebut anggotanya merupakan nelayan sekitar yang tempat wilayah tangkap ikannya tersingkirkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) motif utama penolakan masyarakat nelayan pesisir; dan (2) eskalasi konflik yang terjadi. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mencari data. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat nelayan pesisir bergabung dalam kelompok nelayan kontra tambang dikarenakan tiga yaitu faktor yaitu kerusakan lingkungan oleh aktivitas penambangan di laut terutama di wilayah tangkap, kedua karena kerusakan tersebut mengurangi hasil tangkapan, dan ketiga karena terdapat inkonsistensi dalam melibatkan masyarakat nelayan pesisir ketika menentukan keputusan dan aspirasi. Namun, faktor paling dominan ada pada kepedulian dalam menjaga lingkungan perairan Pantai Matras supaya tidak rusak akibat aktivitas tambang. Hal ini menimbulkan konflik dalam masyarakat, yang mengalami beberapa tahap dan tingkatan: mulanya hubungan masyarakatnya harmonis, diikuti oleh gejala hingga meningkat pada tahap krisis yang melibatkan kekerasan fisik antara masyarakat nelayan pesisir dan penambang serta nelayan pro tambang dan nelayan kontra tambang. Fase pascakonflik ditandai dengan mulai beralihnya profesi para nelayan pesisir karena keterpaksaan dan keterbatasan modal yang dimiliki.

Kata Kunci: Nelayan Kontra Tambang, Penolakan, Eskalasi Konflik

Abstract

The dispute between tin miners and coastal fishing communities in the waters of Matras Beach, Bangka Regency is the subject of this study. The entry of the Production Suction Vessel (KIP) to dredge tin ore in the seas of Matras Beach, Bangka Regency, sparked the dispute. As a result of the community's advantages and disadvantages, pro-mining and contra-mining parties were founded, with members being local fisherman whose fishing regions were excluded. As a result, anti-mining groups have attempted to prevent these activities from taking place in their fishing grounds. The purpose of this research was to discover (1) the primary reasons for coastal fishing villages' rejection, and (2) the conflict's escalation. This research method is descriptive qualitative by conducting interviews, observations, and documentation to gather data. The researcher employed a technique called purposive sampling to find the informant. The results of this study indicate that coastal fishing communities join fishing groups that are mining because of three factors, namely environmental damage by mining activities at sea, especially in fishing areas, secondly because the damage reduces catches, and thirdly because there are inconsistencies in involving coastal fishing communities when determine decisions and aspirations. However, the most dominant factor is concern in protecting the marine environment of Matras Beach so that it is not damaged by mining activities. This creates conflict in the community, which goes through several stages and levels: at first the community relations are harmonious, followed by turmoil until it escalates to a crisis stage involving physical violence between coastal fishing communities and miners as well as pro-mining and counter-mining fishermen. The post-conflict phase is marked by the shift of the professions of coastal fishermen due to compulsion and limited capital.

Keywords: *Anti-Mining Fishermen, Rejection, Conflict Escalation*

PENDAHULUAN

Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan terbesar di Indonesia dengan potensi sumberdaya alam yang sangat besar pula. Namun, potensinya yang paling terkenal adalah pertambangan timah. Timah pada dasarnya sudah ditambang sejak tiga abad lalu namun dibawah rezim yang berbeda-beda (Erman, 2010: 71). Kini, hanya tersisa sebagian kecil cadangan timah di daratan berupa ampas yang juga disebut sebagai *tailing* dan bekas peninggalan dari penambangan yang dilakukan terdahulu (Yunianto, 2009: 98). Menurut Mildan dalam Ibrahim (2015: 79) pada awalnya penambangan timah dilakukan di daratan wilayah Bangka Belitung. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran wilayah aktivitas penambangan timah dari daratan ke laut. Pergeseran wilayah tersebut menimbulkan konflik pelik yang ditandai dengan sikap penolakan masyarakat terhadap kehadiran penambangan timah di laut. Khususnya penolakan dari masyarakat nelayan pesisir yang sehari-harinya menggantungkan kebutuhan hidupnya dari hasil tangkapan di laut.

Konflik ini terjadi di Pantai Matras, Kabupaten Bangka karena ada penolakan masyarakat nelayan pesisir atas aktivitas penambangan timah di perairan Pantai Matras. Aksi penolakan dilakukan yang tertuju kepada pemerintah dan kepada perusahaan yang

yang memiliki IUP. Perairan Pantai Matras merupakan salah satu wilayah tangkapan masyarakat nelayan pesisir setempat yang masih menggunakan peralatan tradisional dan juga sebagai wilayah destinasi wisata untuk masyarakat. Isu awal munculnya kapal isap produksi pada tahun 2015, bulan April–Mei ada masuk kapal keruk 1 unit yang bernama Karimata yang sempat beroperasi selama bulan di perairan Laut Deniang. Lalu ada 2 unit kapal isap produksi masuk perairan Matras, tetapi beroperasi tak lama (sekitar beberapa jam) karena saat itu nelayan menghalau kapal isap produksi yang akan beroperasi (Arsip Dokumen Nelayan Tradisional Peduli Lingkungan (NTPL), 2021). Masyarakat nelayan dari Kelurahan Matras juga melakukan aksi penolakan dengan protes aksi damai ke Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada akhir Desember 2015.

Aksi damai kembali dilakukan pada tahun 2019 di talud dekat tambatan perahu/kapal di pinggir Pantai Matras oleh ratusan nelayan serta warga dengan membentangkan karton dan juga spanduk. Akhir tahun 2020 aksi penolakan kembali memanas karena berdasarkan yang dilansir dari Babelpos.co pada bulan November 2020 ada 8 unit kapal isap produksi yang telah beroperasi milik PT Timah dan mitra (Babelpos.co, 2020). Aksi demo kembali terjadi dengan damai langsung di PT Timah pada tanggal 05 April 2021 dan puncaknya terjadi dibulan Juli 2021, nelayan gabungan dari Kelurahan Matras hingga Desa Pesaren, Riau Silip dan Sungai Liat melakukan aksi protes dengan memblokir aktivitas kapal isap produksi yang beroperasi di perairan Bedukang (Laia, 2021).

Penelitian ini fokus pada kajian mengenai apa motif utama penolakan dalam konflik dengan penambang timah laut di perairan Pantai Matras, Kabupaten Bangka serta bagaimana eskalasi konflik yang terjadi dalam konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui motif utama penolakan dalam konflik dengan penambang timah laut di Pantai Matras, Kabupaten Bangka serta bagaimana eskalasi konflik yang terjadi dalam konflik, serta manfaat penelitian ini yaitu memberikan wawasan ilmiah mengenai kajian konflik pertambangan dengan menggunakan teori konflik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sukidin (2002) dalam buku Siyoto dan Sodik (2015) dalam metode ini penulis berupaya untuk mengungkap berbagai hal unik yang terdapat dalam setiap individu, kelompok, masyarakat, dan/atau

organisasi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari secara utuh, terperinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Siyoto dan Sodik, 2015: 28).

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Oktober hingga November 2021. Penelitian ini dilakukan di Pantai Matras, Kabupaten Bangka dengan asumsi bahwa lokasi ini adanya konflik antara masyarakat nelayan pesisir dengan penambang timah laut. Perbedaan kepentingan yang ada dalam pihak yang terlibat membuat konflik berkelanjutan dan terjadi selama bertahun-tahun. Sehingga munculah kelompok-kelompok dalam konflik tersebut dengan kepentingannya masing-masing.

Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan memiliki beberapa pertimbangan tertentu. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam persoalan konflik yang terjadi, seperti masyarakat nelayan yang tergabung dalam kelompok kontra tambang dan ikut serta dalam aksi penolakan yang dilakukan serta pihak instansi yang turut menangani konflik tersebut.

Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan informan yang sudah ditentukan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung penelitian seperti buku, jurnal dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data selain melakukan wawancara, juga melakukan observasi ke Pantai Matras yang merupakan lokasi terjadinya konflik dan tempat kapal isap produksi.

Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini teknik analisis data Miles dan Huberman. Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) terbagi dalam tiga proses dalam proses pengolahan data yaitu (a) reduksi data (*data reduction*) merupakan proses memilah data mentah yang didapatkan dari hasil lapangan, (b) penyajian data (*data display*) merupakan kumpulan informasi yang telah diatur secara sistematis, dan yang terakhir (c) penarikan simpulan merupakan bagian yang berisikan catatan inti dan penting berdasarkan hasil temuan dari penelitian (Hardani, dkk. 2020: 163).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Motif Utama Penolakan Kelompok Anti Tambang dalam Konflik Penambangan Timah di Perairan Pantai Matraslisis Data

1. Kekhawatiran akan Kerusakan Lingkungan dan Mengecilnya Wilayah Tangkap Nelayan

Salah satu motif utama penolakan masyarakat nelayan pesisir terhadap aktivitas penambangan adalah karena lingkungan akan terkena dampaknya. Hal tersebut disampaikan oleh Cecep saat wawancara pada bulan Oktober 2021, yang merupakan anggota dari organisasi Nelayan Tradisional Peduli Lingkungan (NTPL). Menurut beliau, bahwa dampak yang diakibatkan dari adanya aktivitas penambangan timah di laut akan sangat berpengaruh terhadap nelayan. Hasil pasir yang dikeruk atau disedot dari dasar laut yang menggunakan mesin daya hisap yang kuat, setelah dilakukan pemisahan antara biji timah dan pasir atau lumpur yang terbuang lagi ke laut akan membuat terumbu karang tertutup oleh sedimen yang akan membuat terumbu karang mati dan rusak (Ibrahim, 2015:81). Ketika lingkungan menjadi rusak ini akan mengganggu wilayah tangkap nelayan tradisional dan berpengaruh terhadap hasil tangkapnya, jika semakin lama terjadi akan menyebabkan kemiskinan.

2. Berkurangnya Hasil Tangkapan

Ketika lingkungan menjadi rusak, maka wilayah tangkapan nelayan juga akan menjadi rusak yang berdampak pada hasil tangkap masyarakat nelayan pesisir. Adanya pendangkalan akibat dari aktivitas tambang sehingga membentuk beting-beting yang mengganggu jalan perahu nelayan untuk melaut. Membuat masyarakat nelayan pesisir harus melaut ke perairan yang lebih jauh lagi. Hal ini tidak sebanding dengan peralatan yang dimiliki para nelayan dimana peralatan yang dimiliki nelayan ini masih termasuk tradisional. Rata-rata kapasitas kapal yaitu setengah GT (*gross ton*) dengan ukuran mesin di bawah 15 PK yang berarti kondisi kapal-kapal nelayan ini terbatas dalam hal daya jelajah (Adrian, dkk, 2021:80). Aktivitas kapal isap produksi membuat ekosistem laut mengalami perubahan, ketika terumbu karang rusak maka ekosistem ikan akan terganggu yang nantinya akan membuat hasil tangkap nelayan berkurang.

Berkurangnya hasil tangkapan ikan sudah dirasakan oleh salah satu nelayan yang berinisial A, hasil wawancara pada bulan Oktober 2021 menurut beliau lokasi yang biasa dijadikan lokasi pancing sekarang menjadi terganggu. Sebelum masuk kapal isap produksi itu pendapatan yang biasa diperoleh dari mancing bisa mencapai

1,2 juta meskipun masih pendapatan kotor. Hal ini juga dirasakan oleh Firmansyah bahwa pendapatan nelayan bukan hanya merosot tetapi tidak bisa pergi melaut sama sekali karena wilayah tangkap yang sudah tidak memungkinkan dan peralatan yang dimiliki tidak sesuai.

3. Inkonsistensi Dalam Melibatkan Masyarakat Nelayan Pesisir

Alasan lain yang memperkuat penolakan kapal isap produksi tersebut karena berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat nelayan terhadap instansi pemerintah dan pendukung kapal isap produksi. Masyarakat nelayan pesisir seperti tidak dianggap, terlihat dari tidak seriusnya pihak pengusaha maupun pemerintah dalam melibatkan masyarakat nelayan dalam mengambil keputusan tentang masuknya kapal isap produksi di perairan Pantai Matras maupun dalam pembahasan mengenai kompensasi. Dibentuknya panitia sebagai pengurus pemberian kompensasi bagi masyarakat nelayan yang dibentuk pada tahun 2019, ketidakpercayaan terhadap sistem kompensasi dari perusahaan dan mereka yang disebut panitia. Panitia tersebut mengatasnamakan warga dan nelayan untuk setuju dengan nominal *fee* yang ditentukan oleh panitia, padahal tidak semua warga dan nelayan pernah dilibatkan dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh oknum panitia tersebut. (Arsip Dokumen Nelayan Tradisional Peduli Lingkungan (NTPL), 2021). Sehingga membuat konflik yang terjadi semakin sulit diselesaikan.

Berdasarkan ketiga faktor yang dijelaskan sebelumnya, ada satu faktor dominan dalam penolakan terhadap aktivitas penambangan timah laut di perairan Pantai Matras yaitu kekhawatiran akan kerusakan lingkungan. Menurut Cecep, nelayan lebih peduli dan mementingkan lingkungan di perairan Pantai Matras karena laut merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan hidup seluruh nelayan untuk jangka panjang dan nelayan bergantung dengan laut (Wawancara, Oktober 2021). Wilayah tangkap yang menjadi rusak akan berdampak pada kurangnya hasil tangkap dan pendapatan yang diperoleh sedikit yang akan menyebabkan kemiskinan. Selain itu, membuat adanya kondisi keterpaksaan bagi masyarakat nelayan pesisir untuk melaut ke perairan yang lebih jauh, ini tidak sebanding dengan peralatan yang dimiliki para nelayan dimana peralatan yang dimiliki nelayan ini masih termasuk tradisional.

B. Eskalasi Konflik dalam Konflik Penolakan Penambangan Timah Laut di Perairan Pantai Matras

1. Tahap Pertama: Terbentuknya Kelompok

Temuan dalam penelitian ini ketika adanya aktivitas penambangan timah laut dengan kapal isap produksi memberikan polemik, yaitu terbaginya masyarakat ke dalam kelompok yang saling bertentangan dalam perbedaan kepentingan yang kemudian akan menyebabkan ketidakharmonisan hubungan dalam masyarakat. Kelompok tersebut yaitu kelompok pro tambang dan kelompok kontra tambang. Kelompok pro menganggap bahwa tambang timah di laut dilakukan karena adanya legalitas hukum yang dimiliki dan menuntut untuk mendapatkan hak kompensasi atas aktivitas tersebut. Sedangkan kelompok kontra menolak segala aktivitas penambangan timah di laut dan juga upaya kompensasi karena lebih mementingkan kondisi lingkungan laut pasca aktivitas tersebut (Adrian, dkk, 2021:82).

2. Tahap Kedua: Semakin Meningkatnya Konflik

Pada tahap ini terlihat adanya perbedaan dalam memanfaatkan wilayah sumberdaya, satu sisi ingin memanfaatkan potensi timah dan sisi lainnya ingin menjaga ekosistem laut dan mempertahankan wilayah tangkapnya. Tujuan tersebut saling berbenturan antara kedua pihak. Wilayah yang dijadikan lokasi penambangan di pesisir perairan Pantai Matras tersebut merupakan wilayah tangkap masyarakat nelayan setempat meskipun secara tertulis memang tidak termasuk dalam Perda RZWP3K. Untuk kewenangan ternyata ada perpindahan wewenang tata kelola pertambangan, yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah daerah menjadi pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah pun belum bisa berbuat banyak dalam membantu masyarakat terkait pencabutan IUP yang ada di perairan Pantai Matras.

3. Tahap Ketiga: Aksi Penolakan

Dalam tahap ini pihak yang berkonflik sudah menyadari bahwa adanya perbedaan antara pihak masyarakat nelayan dengan pihak penambang timah laut, semakin berkembangnya isu mengenai adanya kapal isap produksi yang akan beroperasi di Pantai Matras. Pada tahun 2015 isu munculnya kapal isap produksi masuk ke perairan Pantai Matras yang kemudian langsung mendapa penolakan oleh masyarakat nelayan. Pada tahun 2018 isu tersebut tergantikan oleh rencana masuknya PIP (Ponton Isap Produksi) ke perairan Matras-Pesaren melalui perusahaan CV CAS. Lalu dicegah oleh nelayan dan masyarakat sehingga PIP tersebut meninggalkan perairan Pantai Matras (Arsip Dokumen Nelayan Tradisional Peduli Lingkungan (NTPL), 2021).

Aksi penolakan yang dilakukan masyarakat nelayan pesisir sering terjadi dan dilakukan dalam berbagai cara. Menurut Cecep setidaknya sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali aksi itu dilakukan, baik aksi yang dilakukan di Pantai Matras maupun aksi ke kantor pemerintahan seperti Gubernur dan kantor PT Timah (Wawancara, Oktober 2021). Dimulai Desember 2015 dilakukan aksi penolakan dengan cara protes aksi damai ke Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, aksi dibantu oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Pada bulan September 2019 diadakan rapat di Kantor Kelurahan Matras yang dipimpin langsung oleh Lurah Matras saat itu, dihadiri kepala Lingkungan Matras, beserta keenam ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagian warga. Pokok pembahasan mengenai pengusaha yang ingin mengoperasikan kapal isap produksi di perairan Pantai Matras dan keputusan yang ditetapkan bahwa warga matras menolak beroperasinya kapal isap produksi di perairan matras tanpa negoisasi (Arsip Dokumen Nelayan Tradisional Peduli Lingkungan (NTPL), 2021). Setelah pertemuan tersebut ada isu terbentuk panitia pemberian kompensasi mengenai beroperasinya kapal isap produksi di perairan Pantai Matras.

Pada tanggal 09 November 2020 kapal isap produksi masuk ke wilayah perairan Pantai Matras sebanyak 4 unit (Arsip Dokumen Nelayan Tradisional Peduli Lingkungan (NTPL), 2021). Tanggal 10 dan 13 November 2020 dilakukan aksi pengusiran kapal isap produksi dengan menggunakan perahu milik masyarakat nelayan pesisir yang dilakukan oleh nelayan gabungan. Pada bulan Desember 2020 2 (dua) unit kapal isap produksi masuk ke perairan Pantai Matras.

Pada tanggal 14 Desember 2020 sebanyak 4 unit dan tanggal 15 Desember 2020 sebanyak 6 unit kapal isap produksi memasuki wilayah perairan Matras. Pada tahun 2021 konflik masih terjadi, tanggal 05 April 2021 dilakukan aksi damai di PT Timah oleh nelayan gabungan, seperti Kelurahan Matras hingga Desa Pesaren Riau Silip dan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dilakukan protes dengan memblokir aktivitas kapal isap produksi yang beroperasi di perairan Bedukang (Laia, 2021). Aksi lanjutan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021, melakukan aksi dengan langsung turun ke laut menggunakan beberapa perahu mereka masing-masing. Aksi untuk menolak kegiatan penambangan di Laut Bedukang dan Laut Tuing. Masyarakat nelayan pesisir melakukan aksi tersebut karena menganggap tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik ini.

Upaya sosialisasi yang diberikan oleh PT Timah tentang aktivitas penambangan timah laut di perairan Pantai Matras belum memberikan solusi dalam konflik ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Cecep bahwa ketika sosialisasi dilakukan peserta yang datang serta hadir bukanlah masyarakat nelayan pesisir langsung, melainkan diwakilkan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan masyarakat nelayan pesisir namun tidak mempresentasikan keinginan mereka. Pertimbangan dalam keputusan dalam sosialisasi tersebut juga dinilai tidak berpihak kepada masyarakat nelayan pesisir karena sudah jelas ada ketidaksetujuan terhadap peraturan tersebut tapi tetap dilakukan penambangan.

4. Tahap Keempat: Puncak Konflik

Semakin tidak terkontrolnya konflik terlihat karena kemarahan dari pihak yang berkonflik, kerasnya penolakan masyarakat nelayan pesisir itu sendiri membuat tingginya gejolak hingga mencapai puncaknya. Menyebabkan adanya kekerasan fisik antara panitia kompensasi (pro tambang) dengan masyarakat nelayan pesisir (kontra tambang).

“Mereka menambang membentuklah panitia yang pro pertambangan, biar masyarakat digiring pro pertambangan diimingi sekian-sekian jadi masyarakat ikut pro dan inilah yang akan dibenturkan dengan masyarakat yang kontra pertambangan jadi terjadilah perkelahian dengan masyarakat dengan nelayan, antara masyarakat dengan keluarganya sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dibentuknya kelompok pro pertambangan ini sengaja dilakukan dengan “ditawarkan sesuatu” yang kemudian kelompok pro pertambangan ini akan dihadapkan dengan kelompok yang kontra pertambangan. Menyebabkan konflik sesama masyarakat yang berujung pada perkelahian yang tidak dapat terhindarkan. Aksi penolakan juga berlanjut bahkan sampai naik ke kapal yang bertuliskan Chokdee pada bulan November 2020 dengan melakukan pengusiran kapal isap produksi menggunakan beberapa perahu nelayan yang berasal dari Kelurahan Matras hingga Pesaren.

Aksi lain yang menunjukkan tahap puncaknya saat aksi naik kapal pada 12 Juli 2021. Sekitar 300 orang nelayan gabungan dari beberapa desa dan kelurahan yang tergabung kedalam Nelayan Tradisional Peduli Lingkungan (NTPL) menduduki kapal isap produksi atas nama PT Tirtamas Bangka Lestari dengan nama lambung kapal KIP Citra Bangka Lestari (CBL). Dengan melakukan aksi blokade laut untuk memprotes

penambangan timah oleh kapal isap produksi PT Timah di laut Bedukang dan laut Tuing (Arsip Dokumen Nelayan Tradisional Peduli Lingkungan (NTPL), 2021).

5. Tahap Kelima: Upaya Penyelesaian

Menurut Suhardono resolusi konflik merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh individu untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi dengan individu lain secara sukarela (Suhardono, 2015:5). Menurut Dahrendorf ada 3 bentuk upaya pengaturan konflik yang biasa digunakan sebagai resolusi konflik yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase (Dahrendorf 1986:286). Upaya yang dilakukannya adalah dengan melakukan mediasi antara masyarakat nelayan pesisir dengan pihak dari penambang yaitu PT Timah di kantor Kelurahan Matras, pihak kelurahan sebagai pihak ketiga.

“Kita dikantor lurah ini juga sudah ada upaya mediasi kedua belah pihak antara nelayan dengan PT Timah. Waktu itu pihak PT Timah menawarkan nelayan untuk membuat kerambah apung tapi ditolak oleh pihak nelayan. Kerambah apung itu untuk supaya lumpurnya tidak mencemar, supaya habitat lautnya terjaga. Waktu itu juga ada ditawarkan diberi bibit kakap merah, cumi, termasuk bibit kepiting dari PT Timah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menurut Yunizar, upaya untuk meminimalisir dampak akibat penambangan timah laut di perairan Pantai Matras terhadap lingkungan sudah ada dari PT Timah. Upaya untuk mengatasi lumpur supaya tidak mencemari ekosistem laut sekitar, mengatasi limbah, mengatasi habitat laut tapi upaya tersebut mendapat penolakan pihak masyarakat nelayan. Pasca aksi demonstrasi masyarakat nelayan pesisir gabungan dari beberapa kelurahan pada tanggal 05 April 2021, pemerintah provinsi yaitu Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menindaklanjuti dengan mengundang perwakilan nelayan untuk Rapat Koordinasi antara gubernur dan seluruh Forkopimda Bangka Belitung pada tanggal 15 April 2021. Dalam rapat koordinasi tersebut belum ada kesepakatan yang tercapai sedangkan kapal isap produksi tetap beroperasi di kawasan perairan Pantai Matras.

6. Tahap Keenam: Setelah Terjadinya Konflik

Pada tahap ini aksi penolakan jarang dilakukan, karena masyarakat nelayan pesisir sudah terlalu malas untuk bertindak lebih jauh mengingat adanya aturan yang membatasi ruang gerak mereka. Pascakonflik terjadi dengan ditandai suatu keadaan terpaksa muncul dalam masyarakat. Terpaksa beralih profesi demi menyambung hidup agar tetap mendapatkan penghasilan, beralih pekerjaan dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Ada yang menjadi karyawan swasta, ada juga yang beralih menjadi penambang dengan memanfaatkan sisa atau biasa disebut tailing dari kapal isap

produksi yang beroperasi di perairan Pantai Matras. Keadaan yang memaksa untuk beralih menjadi penambang untuk mendapatkan penghasilan.

Seperti yang dialami oleh informan A, menjadi nelayan hanyalah sebagai pekerjaan sampingan, karena lebih memilih bekerja di bidang lain dengan *skill* yang dimiliki. Tempat biasa untuk memancing sudah tidak ada maka tidak bisa lagi mengharapkan penghasilan menjadi nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beruntung, A masih memiliki keahlian lain untuk bekerja sehingga tidak menggantungkan hidupnya lagi pada hasil tangkapan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 motif utama penolakan aktivitas penambangan timah laut di perairan Pantai Matras yaitu untuk menjaga lingkungan agar tidak rusak dan wilayah tangkap nelayan, berkurangnya hasil tangkapan nelayan dan inkonsistensi dalam melibatkan masyarakat nelayan pesisir. Satu faktor dominan dalam penolakan yaitu kekhawatiran akan kerusakan lingkungan. Masyarakat nelayan lebih peduli dan mementingkan lingkungan di perairan Pantai Matras karena laut merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan hidup seluruh nelayan untuk jangka panjang dan nelayan bergantung dengan laut. Dilakukanlah berbagai aksi penolakan oleh masyarakat nelayan pesisir Kelurahan Matras, yang juga dibantu oleh masyarakat dari wilayah lain yang juga melaut di perairan Pantai Matras. Aksi sudah dilakukan sejak tahun 2015 dan hingga tahun 2021. Mulai dari aksi di Kantor Gubernur, di Kantor DPRD Provinsi, di PT Timah, hingga aksi langsung dilakukan di Pantai Matras, Kabupaten Bangka. Terkait perizinan aktivitas penambangan tersebut memang ada, tetapi sangat disayangkan sekali karena hal tersebut berbenturan dengan kepentingan masyarakat nelayan pesisir.

Terkait eskalasi yang terjadi dalam konflik tersebut ada enam tahap yang terjadi dalam konflik tersebut. Dimulai dari terbentuknya kelompok di masyarakat dalam menanggapi isu. Tahap kedua dengan isu masuknya kapal isap produksi dan kepentingan yang berbenturan antara aktor yang berkonflik. Tahap ketiga sudah dilakukan aksi penolakan dimulai padatahun 2015 terhadap kapal isap produksi dimulai dari demonstrasi di beberapa tempat sampai dengan melakukan pengusiran langsung terhadap kapal isap produksi yang ada di perairan Pantai Matras. Tahap keempat

ditandai dengan semakin memanasnya konflik dengan sikap kemarahan, kebencian dan penolakan semakin terlihat dalam aksi penolakan yang melibatkan kekerasan fisik antara masyarakat nelayan pesisir dengan kelompok yang pro pertambangan. Aksi menaiki kapal isap produksi (Chokdee pada November 2020 dan Citra Bangka Lestari pada Juli 2021). Tahap kelima ditandai dengan adanya upaya penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan dengan mempertemukan masyarakat nelayan pesisir dengan perwakilan dari PT Timah sebagai pihak penambang memberikan penawaran pembuatan keramba apung dan beberapa bibit budidaya perikanan tetapi ditolak. Upaya pemberian dana kompensasi juga ditolak, meskipun tetap ada yang menerima kompensasi tersebut dengan keterpaksaan. Karena masyarakat nelayan pesisir ini kurang mempercayai mereka yang disebut sebagai panitia kompensasi karena tidak adanya transparansi terhadap audit dana kompensasi tersebut. Terakhir, tahap keenam pascakonflik ditandai dengan konflik yang mulai “tenang” tetapi hubungan di masyarakat tidak kembali harmonis bagi kelompok pro dan kontra pertambangan. Mulai beralihnya profesi para masyarakat nelayan pesisir karena keterpaksaan dan keterbatasan modal yang dimiliki.

Saran

Terkait konflik yang terjadi antara masyarakat nelayan pesisir dan perusahaan penambangan timah laut di perairan Pantai Matras, hendaknya pemerintah lebih memerhatikan rakyat kecil dengan memberikan peran yang maksimal dalam menyelesaikan konflik. Hal ini tentu berkenaan dengan pemaksimalan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat nelayan pesisir dalam penyelesaian konflik. Pemerintah diharapkan untuk melakukan evaluasi dan pertimbangan terhadap pemberian izin atas beroperasinya kapal isap produksi terutama di wilayah perairan Pantai Matras. Dan tak lupa bagi panitia kompensasi harus transparan dan pembagiannya pun harus jelas sasarannya serta sesuai dengan aturan yang sudah ada dan disepakati bersama.

TENTANG PENULIS

Penulis bernama Kiki Ulvianti mahasiswi Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bangka Belitung angkatan 2017. Penulis lahir pada tanggal 17 Oktober 1999 dan merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara. Penulis merupakan alumni dari SMAN 4 Pangkalpinang. Email: Kikyu17@gmail.com.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Adrian, Krisna dan Winarno, dan Hartanto, R, V, P. 2021. Analisis Dampak Aktivitas Proyek Tambang Timah di Perairan Laut Pulau Bangka Terhadap Hak Atas Pekerjaan Nelayan Traditional: Perspektif *Inclusive Citizenship*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 2.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik*. Jakarta: Rajawali.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Erman, Erwiza. 2010. *Aktor, Akses Dan Politik Lingkungan Di Pertambangan Timah Bangka*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Edisi XXXVI NO. 2). Hal. 71.
- Ibrahim, Indra. 2015. *Dampak Penambangan Timah Ilegal Yang Merusak Ekosistem Di Bangka Belitung*. Selisik, Vol. 1 (No. 1). Hal. 79.
- Suhardono, Wisnu. 2015. *Konflik dan Resolusi*. *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 2 (No. 1). Hal 5.
- Yunianto, Bambang. 2009. *Kajian Problema Pertambangan Timah Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional*. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Vol. 5 (No. 3). Hal. 98.

Internet:

- Babelpos.co. 2020. *Matras Terus Panas?*. Diakses tanggal 20 Januari 2021 dari <https://babelpos.co/2020/11/28/matras-terus-panas/>.
- Laia, Kennial. 2021. *Nelayan Matras-Pesaren Lancarkan Aksi Protes Lanjutan*. Diakses tanggal 05 Oktober 2021 dari <https://betahita.id/news/detail/6341/nelayan-matras-pesaren-lancarkan-aksi-protes-lanjutan-.html?v=1626210253%20?%3E>.

Dokumen lain:

- Arsip Dokumen Nelayan Tradisional Peduli Lingkungan (NTPL). 2021.